

**RENCANA KERJA ( RENJA )**

**SKPD**

**KECAMATAN HAUR GADING**

**TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**KECAMATAN HAUR GADING**

**2019**



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 24 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RKPd ditetapkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPd ditetapkan;
  - c. bahwa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memerlukan adanya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2020.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara disingkat RKPd adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (out put), hasil (out come) maupun dampak (impact).
10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (out come) program perangkat daerah.
11. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

## BAB II KEDUDUKAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (2) Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (3) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

### Pasal 3

*Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:*

BAB I : PENDAHULUAN;  
 BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;  
 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;  
 BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;  
 BAB V : PENUTUP.

### Pasal 4

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

## Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.

**BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

## Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Agustus 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 12 Agustus 2019

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

  
**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 12 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

  
**MUHAMMAD TAUFIK**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2019 NOMOR 24.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami ucapkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat, Karunia dan petunjukNya jualah Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 dapat kami selesaikan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2020 ini disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2020 ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Haur Gading pada Tahun Anggaran 2020, serta sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2020 yang akan datang.

Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen ini. Kami menyadari bahwa Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 ini masih jauh dari

sempurna. Oleh karena itu segala saran yang sifatnya membangun akan kami terima demi penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja ini.

Amuntai, 29 Juli 2019

CAMAT HAUR GADING



**Drs. H. NAZRI**

NIP. 19610810 199203 1 007

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	25
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	33
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	
4.1 Program dan Kegiatan .....	35
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	50

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Haur Gading sampai dengan Tahun 2018 .....	10
Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pendapatan SKPD Kecamatan Haur Gading Tahun 2018.....	18
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara .....	21
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Utara .....	27
Tabel 2.5 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2020 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	29
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Kecamatan Haur Gading Tahun 2020 dan perkiraan Maju 2021 .....	37

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Guna Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diantaranya telah diatur bahwa setiap SKPD wajib untuk menyusun Rencana

Strategis SKPD (Renstra SKPD) sebagai bentuk rencana kerja lima tahunan SKPD dengan mengacu pada dokumen RPJMD, serta menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai bentuk rencana tahunan SKPD yang mengacu pada dokumen RKPD dan Renstra SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Haur Gading pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Kecamatan Haur Gading terhadap apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Haur Gading agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik.

Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2020 adalah merupakan dokumen rencana tahunan, karena tahapannya tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Haur Gading 2017-2022 maupun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022. Namun demikian sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2022 sebagai pedoman untuk menyusun RKPD Tahun 2020 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2017-2022 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2017-2022. Dengan demikian Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2020 ini secara umum mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 maupun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Haur Gading Tahun 2017-2022.

Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bagi pengambil kebijakan di tingkat atas dalam menetapkan kebijakan

perencanaan pembangunan daerah pada tahun yang akan datang, khususnya dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2020 yang akan datang.

## **I.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Haur Gading tahun 2020 didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tentunya tidak terlepas dari landasan hukum keberadaan organisasi Kecamatan dan proses perencanaan itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Haur Gading.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2022;
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara ;

11. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

**Maksud** penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan khususnya di Kecamatan Haur Gading serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan **Tujuan** dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2020 ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD Kecamatan Haur Gading dalam menentukan berbagai rencana kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang akan datang.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Haur Gading Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

#### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan.

### BAB V PENUTUP

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**SKPD TAHUN LALU**

**2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2018) dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Haur Gading tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD Kecamatan Haur Gading dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 43 tahun 2018, dalam pasal 3 disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Haur Gading berkenaan dengan upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat adalah dikarenakan masih belum adanya pelimpahan wewenang secara penuh kepada kecamatan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi kecamatan itu sendiri hal ini di sebabkan adanya kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui anggarannya padahal kegiatan-kegiatan tersebut sudah disusun dalam RENSTRA Kecamatan Haur Gading 2017-2022 guna peningkatan kinerja aparatur Kecamatan Haur Gading kedepannya.

Sebagai implementasi dari pelaksanaan prioritas dimaksud maka SKPD Kecamatan Haur Gading pada **Tahun Anggaran 2018** diberikan wewenang untuk melaksanakan **7 Program** dengan **25 Kegiatan**, yaitu :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan :
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
  5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
  6. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
  7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  8. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  10. Penyediaan Makanan dan Minuman.
  11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
  12. Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan Pemerintah Daerah
2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kegiatan :
  1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
  3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
  4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan : 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Program : Pembinaan Pelayanan Administrasi Kecamatan
- Kegiatan : 1. Pembinaan Administrasi PBB dan PAD.  
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  
3. Monitoring Kegiatan Sosial dan Keagamaan.  
4. Monitoring Perizinan Bangunan di Kecamatan.
5. Program : Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan
- Kegiatan : 1. Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Tingkat Kecamatan
6. Program : Peningkatan Pelayanan Terpadu
- Kegiatan : 1. Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)  
2. Pelayanan Distribusi Beras Sejahtera (Rastra).
7. Program : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tingkat Kecamatan
- Kegiatan : 1. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Beberapa hambatan dan permasalahan tentunya juga dihadapi oleh SKPD Kecamatan Haur Gading dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2018 yang lalu terutama mengenai permasalahan pada program pembinaan pelayanan administrasi kecamatan yaitu terutama mengenai pembinaan dan monitoring ke desa-desa disebabkan karena pejabat yang berwenang tidak sepenuhnya menjalankan hal tersebut.

Selanjutnya rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Haur Gading sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Haur Gading  
sampai dengan Tahun 2018

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan				
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
<b>URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG</b>															
<b>BIDANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>															
4	01	19	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kera	500 %	0	100 %	197.135.050	79,07 %	100 %	189.328.483	88,51 %	
4	01	19	01	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk dan surat keluar yang di distribusikan sesuai peruntukannya	500 %	0	100 %	3.200.000	91,42 %	100 %	2.550.000	72,86 %	
4	01	19	01	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	500 %	0	100 %	10.168.500	81,34 %	100 %	11.814.083	84,38 %	
4	01	19	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	500 %	0	100 %	6.600.000	80,00 %	100%	4.850.000	64,67 %	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
4 01 19 01 07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase ketepatan pertanggungjawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	500 %	0	100 %	33.000.000	100 %	100 %	33.000.000	100 %	
4 01 19 01 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase jasa kebersihan yang terealisasi	500 %	0	100 %	30.000.000	100 %	100 %	30.000.000	100 %	
4 01 19 01 10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase ATK yang digunakan	500 %	0	100 %	8.322.000	55,48 %	100 %	10.224.850	68,17 %	
4 01 19 01 11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	500 %	0	100 %	10.903.750	90,86 %	100 %	6.552.950	94,28 %	
4 01 19 01 12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase instalasi listrik dalam kondisi baik	500 %	0	100 %	5.000.000	100 %	100 %	4.650.000	100 %	
4 01 19 01 13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Barang yang dibeli sesuai spesifikasi yang di butuhkan	25 Buah	0	5 Buah	0	0	5 Buah	29.800.000	89,48 %	
4 01 19 01 17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase realisasi pelaksanaan rapat	500 %	0	100 %	14.500.000	87,90 %	100 %	6.275.000	48,26 %	
4 01 19 01 18	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase SPPD luar daerah dilaksanakan	500 %	0	100 %	74.030.800	99,92 %	100 %	47.301.600	98,55 %	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
4 01 19 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	0	100 %	44.638.450	86,25 %	100 %	49.958.244	56,99 %	
4 01 19 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	10 Buah	0	0	0	0	3 Buah	17.287.130	82,31 %	
4 01 19 02 22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor dalam kondisi baik	500 %	0	100%	16.605.000	89,80 %	100 %	10.899.000	39,63 %	
4 01 19 02 24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang di pelihara	10 Buah	0	1 Buah	23.033.450	81,53 %	100 %	17.582.114	51,48 %	
4 01 19 02 28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang di pelihara	40 Buah	0	8 Buah	5.000.000	100 %	8 Buah	4.190.000	83,80 %	
4 01 19 02 21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Persentase Rumah dinas dalam kondisi baik	500 %	0	0	0	0	100%	0	0	
4 01 19 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai topoksi</b>	500 %	0	100 %	4.000.000	100 %	100 %	0	0	
4 01 19 05 03	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase ASN yang dapat mengikuti diklat	500 %	0	100 %	4.000.000	100 %	100 %	0	0	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12	
		formal										
4	01	19	06									
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>400 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Persentase kualitas capaian inerja dan pengelolaan keuangan daerah										
4	01	19	06	01	400 %	0	0	0	100%	0	0	
		Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
		Persentase dokumen yang diselesaikan tepat waktu										
4	01	19	07		500 %	0	100 %	8.053.400	40,26 %	100 %	5.010.000	41,75 %
		<b>Program Pembinaan Pelayanan Administrasi Kecamatan</b>										
		<b>Persentase desa yang tertib administrasi</b>										
4	01	19	07	01	90 Desa	0	18 Desa	2.799.000	70,00 %	18 Desa	2.500.000	83,33 %
		Kegiatan Pembinaan Administrasi PBB dan PAD										
		Jumlah Desa yang di Bina administrasi PBB dan PAD										
4	01	19	07	02	90 Desa	0	18 Desa	0	0	18 Desa	1.500.000	50,00 %
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat										
		Jumlah Desa yang di monitoring pembinaan pembangunan										
4	01	19	07	04	90 Desa	0	18 Desa	2.039.800	51,00 %	18 Desa	610.000	20,33 %
		Kegiatan Monitoring Kegiatan Sosial dan Keagamaan										
		Jumlah Kegiatan social keagamaan yang di monitoring										
4	01	19	07	05	900 Buah	0	200 Buah	1.284.800	32,12 %	100 %	500.000	16,67 %
		Kegiatan Monitoring Perizinan Bangunan di Kecamatan										
		Jumlah Perizinan yang di monitoring										
4	01	19	07	02	90 Desa	0	18 Desa	1.929.800	32,12 %	100 %	0	0
		Kegiatan Pembinaan Desa										
		Jumlah Desa yang di Bina										

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
4 01 19 32	<b>Program Peningkatan Pelayanan Terpadu</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat</b>	500 %	0	0	109.212.200	95,43 %	100 %	100.478.200	80.72 %	
4 01 19 32 01	Pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yang dikeluarkan	3300 Berkas	0	800 Berkas	33.050.000	96,92 %	800 Berkas	31.030.000	83,19 %	
4 01 19 32 02	Pelayanan Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA)	Jumlah RTS PM yang menerima RASTRA	5.695 RTS-PM	0	1.139 RTS-PM	76.162.200	92,50 %	1.139 RTS-PM	69.448.200	79,67 %	
4 01 19 21	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Usulan Desa yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan</b>	500 %	0	100 %	0	0	100 %	20.000.000	100 %	
4 01 19 21 01	Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang di Tingkat Kecamatan	10 Kegiatan	0	2 Kegiatan	0	0	2 Kegiatan	20.000.000	100 %	
<b>BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>											
4 01 19 23	<b>Program Pendukung Kelancaran Pemilu</b>	<b>Persentase daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya</b>	300 %	0	100 %	6.900.000	98,60 %	100 %	0	0	
4 01 19 23 01	Pemantauan dan dukungan Pelaksanaan Pemilu dan pemilu Kada di Daerah	Terlaksananya Kegiatan pemantauan pelaksanaan pemilu dan pemilu kada	3 Kegiatan	0	1 Keg	6.900.000	98,60 %	1 Keg	0	0	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2022 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2017 (tahun lalu/n-2)			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (2019)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-1)		Catatan				
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian	Tingkat capaian (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
<b>URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG BIDANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>															
4	01	19	26	Program Pemberdayaan masyarakat dan Desa	Persentase Suksesnya Kegiatan SKPD di Kecamatan	500 %	0	100%	19.818.500	99,10 %	100 %	15.000.000	100 %		
4	01	19	26	17	Pembinaan Masyarakat Sejahtera	Jumlah Kegiatan SKPD yang di fasilitasi	60 Kegiatan	0	12 Keg	19.818.500	99,10 %	12 Keg	15.000.000	100 %	

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Haur Gading Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Program/kegiatan yang **tidak memenuhi target kinerja** hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu ;

➤ **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-undangan dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tidak memenuhi target realisasi kinerja hal ini disebabkan karena prosesnya yang berbelit-belit

➤ **Program Pembinaan Pelayanan Administrasi Kecamatan**

Dalam program ini ada beberapa kegiatan yaitu Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa, Kegiatan Monitoring Kegiatan Sosial dan Keagamaan, Kegiatan Monitoring Perizinan Bangunan di Kecamatan, masih tidak memenuhi target kinerja khususnya pada anggaran belanja makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas dalam daerah hal ini di sebabkan karena pejabat pelaksana teknis kegiatan tidak sepenuhnya melakukan kegiatan tersebut padahal anggaran kegiatan pembinaan dan monitoring ke desa sudah tersedia.

2) Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu ;

Seluruh Program dan Kegiatan selain yang diuraikan di atas, dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan persentase hampir 100%.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

### Pengukuran Kinerja.

Pengukuran Kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dalam kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Pengukuran Kinerja SKPD Kecamatan Haur Gading dituangkan dalam kegiatan melalui deskripsi rencana dan realisasi kinerja Kecamatan Haur Gading. Seluruh kegiatan SKPD Kecamatan Haur Gading pada tahun 2018 dibiayai dengan anggaran belanja sebesar Rp. 2.040.181.000,- (*dua milyar empat puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 1.685.986.533 ,- (*satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah*) atau sekitar 82,64%.

### Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Haur Gading pada tahun 2018 juga diberikan target Pendapatan Asli Daerah berupa penerimaan Hasil Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang dibebankan kepada SKPD Kecamatan Haur Gading pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 24.400.850,- yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Adapun target dan realisasi pendapatan SKPD Kecamatan Haur Gading pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

## Target dan Realisasi Pendapatan

## SKPD Kecamatan Haur Gading Tahun 2018

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	KET.
1	2	3	4	5
1	Retribusi Pelayanan Pasar	16.000.000,-	10.380.000,-	
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	100.000,-	
3	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	8.400.850,-	20.549.600,-	
	<b>J U M L A H</b>	<b>24.400.850,-</b>	<b>31.029.600,-</b>	<b>27,16 %</b>

Berdasarkan data sebagaimana disajikan tabel 2.2 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 SKPD Kecamatan Haur Gading dapat melaksanakan dan memenuhi tugas dalam hal memberikan sumber pemasukan bagi Kas Daerah. Pada tahun 2018 Realisasi pendapatan yang di terima sebesar Rp. 31.029.600 dan melebihi target sebesar Rp. 6.628.750 dengan peningkatan sebesar 27,16%. Realisasi pendapatan ini jelas mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2017 yang hanya sebesar Rp. 22.302.000,- atau terjadi peningkatan sebesar 39,13%.

### **Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan**

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Kecamatan Haur Gading tahun 2018 tidak terlepas dari adanya dukungan yang telah dianggarkan dalam DPA Kecamatan. Pelaksanaan DPA tahun 2018 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak terlepas dengan makna dan substansi Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten HSU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Anggaran yang di bebaskan dalam DPA Perubahan Kecamatan Haur Gading untuk Tahun Anggaran 2018 yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.551.706.000,- untuk gaji dan tunjangan PNS. Dari anggaran yang tersedia sampai dengan bulan Desember 2018 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.302.961.606,- atau sebesar 83,97%.

Sedangkan Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 435.175.000,- yang mana sampai dengan bulan Desember 2018 dapat direalisasikan sebesar Rp. 336.887.797,- atau sebesar 77,41%

Belanja Modal di Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp. 53.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.137.130,- atau sebesar 86,56%. Belanja Modal yang dilaksanakan pada tahun 2018 menambah asset tetap bagi Kecamatan Haur Gading yang digunakan dalam kegiatan roda Pemerintahan.

Belanja Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp. 33.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.800.000,- atau sebesar 89,48%.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2018 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp. 31.850.000,- atau 6,43%.

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Haur Gading  
Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	Indikator*)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	-	-	100%	100%	100%	100%	89,32 %	-	100%	100%	
2	Persentase Kualitas Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan daerah	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	Tahun 2018 tidak ada pelaksanaan kegiatan
3	Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik	-	-	100%	100%	100%	100%	57,00%	-	100%	100%	
4	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai topoksi	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	Tahun 2018 tidak ada pelaksanaan kegiatan
5	Persentase Desa yang tertib administrasi	-	-	100%	100%	100%	100%	57,15%	-	100%	100%	
6	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan masyarakat	-	-	100%	100%	100%	100%	80,72%	-	100%	100%	
7	Persentase Usulan Desa yang diakomodir dalam Musrenbang			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

NO	Indikator*)	SPM/standar nasional	IKK (PP-6/2008)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019	
	Kecamatan											
8	Persentase Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	-	-	100%	-	100%	-	-	-	-	100%	Tahun 2018 tidak ada pemilu dan pemilu kada
9	Persentase Suksesnya Kegiatan SKPD di Kecamatan Haur Gading	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Haur Gading dimaksudkan untuk menentukan permasalahan maupun hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Haur Gading berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Haur Gading tahun sebelumnya.

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 43 Tahun 2018 Pasal 2 disebutkan bahwa Organisasi Kecamatan Haur Gading berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dipimpin oleh seorang Camat. Adapun tugas pokok Kecamatan Haur Gading adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, meliputi menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perbup, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh aparat daerah di Kecamatan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Kecamatan Haur Gading berdasarkan tugas diatas yang diberikan memiliki kendala dalam penerapannya, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan Bupati

tentang wewenang yang dilimpahkan kepada Camat. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Camat berpegang kepada hal-hal yang selama ini memang telah menjadi tugas Camat, hal ini demi kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas SKPD berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Haur Gading tahun 2020 dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan Haur Gading sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima

kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading berdasarkan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Haur Gading.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta indikator kinerja program/kegiatan. Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD dapat dilihat Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020  
Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nama SKPD : Kecamatan Haur Gading

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Haur Gading	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100%	281.166.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Kecamatan Haur Gading	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja	100%	281.166.	
2.	Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Haur Gading	Persentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	100%	3.200.	<b>Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Kecamatan Haur Gading	Persentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	100%	3.200.	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Haur Gading	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	112.250.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Kecamatan Haur Gading	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	112.250.	
4.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Kecamatan Haur Gading	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai topoksi	100	15.000.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Kecamatan Haur Gading	Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai topoksi	100%	15.000.	

5.	<b>Program Pembinaan Pelayanan Administrasi Kecamatan</b>	Kab. Hulu Sungai Utara	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	20.000.	<b>Program Pembinaan Pelayanan Administrasi Kecamatan</b>	Kecamatan Haur Gading	Persentase desa yang tertib administrasi	100 %	20.000.		
6.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Terpadu</b>	Kecamatan Haur Gading	Persentase Pelayanan terhadap masyarakat yang berurusan ke kantor Camat	100 %	74.609.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Terpadu</b>	Kecamatan Haur Gading	Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat	100 %	74.609.		
7.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Kecamatan Haur Gading	Persentase Usulan yang di akomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100 %	18.000.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Kecamatan Haur Gading	Persentase Usulan Desa yang di akomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100 %	18.000.		
8.	<b>Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum</b>	Kecamatan Haur Gading	Persentase Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	100 %	15.000.	<b>Program Pendukung Kelancaran Pemilu</b>	Kecamatan Haur Gading	Persentase Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	100 %	15.000.		
9.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Haur Gading	Persentase Suksesnya Kegiatan SKPD di Kecamatan Haur Gading	100 %	15.000.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	Kecamatan Haur Gading	Persentase Suksesnya Kegiatan SKPD di Kecamatan	100%	15.000.		
<b>J U M L A H</b>						<b>554.225.</b>	<b>J U M L A H</b>					<b>554.225.</b>

Sebagai hasil review terhadap rancangan awal RKPD tersebut di atas, maka setelah dilakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan, maka untuk SKPD Kecamatan Haur Gading merumuskan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang akan datang sebagaimana tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5  
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2020  
Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Sumber Dana	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kecamatan Haur Gading</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja</b>	<b>100 %</b>	<b>281.166</b>	<b>APBD II</b>	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Haur Gading	Persentase surat masuk dan surat keluar yang didistribusikan sesuai peruntukannya	100 %	3.500	APBD II	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Haur Gading	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik dan internet	100 %	12.500	APBD II	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (dapat difungsikan)	100 %	7.500	APBD II	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Haur Gading	Persentase ketepatan pertanggungjawab jawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	100 %	27.000	APBD II	
	Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase jasa kebersihan kantor yang terealisasi	100 %	30.000	APBD II	
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase ATK yang digunakan	100 %	15.000	APBD II	
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Haur Gading	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	100 %	16.000	APBD II	

	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Persentase instalasi listrik dalam kondisi baik	100 %	5.000	APBD II	
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	100 %	42.150	APBD II	
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Haur Gading	Persentase realisasi pelaksanaan rapat	100 %	19.000	APBD II	
	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kecamatan Haur Gading	Persentase SPPD luar daerah yang dilaksanakan	100 %	103.516	APBD II	
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Kecamatan Haur Gading</b>	<b>Persentase Laporan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>	<b>3.200</b>	<b>APBD II</b>	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	Kecamatan Haur Gading	Tersedianya Laporan RENSTRA, RENJA, dan LAKIP	100 %	3.200	APBD II	
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kecamatan Haur Gading</b>	<b>Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>112.250</b>	<b>APBD II</b>	
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Kendaraan Dinas Baru	100 %	63.000	APBD II	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Rumah Dinas yang di pelihara	100 %	2.500	APBD II	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	100 %	8.000	APBD II	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	100 %	34.450	APBD II	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Barang yang dipelihara	100 %	4.300	APBD II	
<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Kecamatan Haur Gading</b>	<b>Persentase SDM yang menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari Diklat/Bimtek yang diikuti</b>	<b>100 %</b>	<b>15.000</b>	<b>APBD II</b>	
	Kegiatan Bimbingan Terkait Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat / Bimtek yang sesuai Tupoksi	100 %	15.000	APBD II	

5.	<b>Program Pembinaan Pelayanan Administrasi Kecamatan</b>	<b>Kecamatan Haur Gading</b>	<b>Persentase Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>20.000</b>	<b>APBD II</b>	
	Kegiatan Pembinaan Administrasi PBB dan PAD	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Desa yang di Bina	100 %	4.000	APBD II	
	Kegiatan Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Desa yang di Monitoring	100 %	4.000	APBD II	
	Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Desa yang di Bina	100 %	4.000	APBD II	
	Kegiatan Monitoring Kegiatan Sosial dan Keagamaan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Kegiatan yang di monitoring	100 %	4.000	APBD II	
	Kegiatan Monitoring Perizinan Bangunan di Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Perizinan yang di monitoring	100 %	4.000	APBD II	
6.	<b>Program Peningkatan Pelayanan Terpadu</b>	<b>Kecamatan Haur Gading</b>	<b>Persentase Pelayanan Terhadap Masyarakat di kantor kecamatan Haur Gading</b>	<b>100 %</b>	<b>74.609</b>	<b>APBD II</b>	
	Pengembangan Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di keluarkan	100 %	59.909	APBD II	
	Pelayanan Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA)	Kecamatan Haur Gading	Jumlah RTS PM yang menerima RASTRA	100 %	14.700	APBD II	
7.	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Kecamatan Haur Gading</b>	<b>Persentase Usulan Desa yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan</b>	<b>100 %</b>	<b>18.000</b>	<b>APBD II</b>	
	Pelaksanaan Musrenbang RKPd di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	Terlaksananya Musrenbang di Tingkat Kecamatan	100 %	18.000	APBD II	
8.	<b>Program Pendukung Kelancaran Pemilu</b>	<b>Kecamatan Haur Gading</b>	<b>Persentase Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya</b>	<b>100 %</b>	<b>15.000</b>	<b>APBD II</b>	
	Pemantauan dan dukungan pelaksanaan pemilu dan pemilu kada di daerah	Kecamatan Haur Gading	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kada	100 %	15.000	APBD II	
9.	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>Kecamatan Haur Gading</b>	<b>Persentase Kegiatan SKPD di Kecamatan Haur Gading</b>	<b>100 %</b>	<b>15.000</b>	<b>APBD II</b>	
	Pembinaan Masyarakat Sejahtera	Kecamatan Haur Gading	Jumlah Kegiatan SKPD yang di fasilitasi	100 %	15.000	APBD II	
<b>JUMLAH</b>					<b>554.225</b>		

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public.

Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Haur Gading dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek

perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana telah dikemukakan di atas. Selanjutnya dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Haur Gading mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

#### **Tujuan**

Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

#### **Sasaran**

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang transparan dan akuntabel, meningkatnya pelayanan publik yang prima dan meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Haur Gading dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel : 3.1

## Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Haur Gading

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Saat Ini (2016)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir Periode (2022)
							2018	2019	2020	2021	2022	
<b>MISI 1 : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif</b>												
1	Mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional dan produktif	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang transparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Kecamatan	NA	BB	BB	A	A	A	A
				Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan	NA	72	74	76	78	80	80
<b>MISI 2 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dengan Ditopang Nilai-nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah</b>												
2	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas	Persentase desa dengan kategori Desa Mandiri ( nilai Index Pembangunan Desa >50 )	4%	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang mengikutsertakan masyarakat dalam merencanakan pengelolaan dana desa untuk pembangunan	NA	50	60	70	80	90	90

## BAB IV

### RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN

#### 4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) 2020 Kecamatan Haur Gading merupakan implementasi atas visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan tahapan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Haur Gading tahun 2017 s/d 2022 berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Haur Gading. Penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Haur Gading Tahun 2020 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan.

Program Kantor Kecamatan Haur Gading tahun 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan, sebagaimana tercantum dalam RENSTRA Kecamatan Haur Gading Tahun 2017-2022. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Berpedoman pada tahun sebelumnya dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD Kecamatan Haur Gading, maka untuk tahun 2020 Program dan Kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan oleh Kecamatan Haur Gading adalah sebagaimana tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.1  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KECAMATAN HAUR GADING  
TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
								APBD Murni	DAK		APBD Prov				APBN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
<b>URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG</b>																	
<b>BIDANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>																	
4	01	19	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Peningkatan Implementasi Good Governance Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Haur Gading	100 %	281.166.000	281.166.000	0	0	0	0	100 %	261.400.000	
4	01	19	01	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Implementasi Good Governance Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase surat masuk dan surat keluar yang di distribusikan sesuai peruntukannya	Kecamatan Haur Gading	100 %	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	100 %	5.000.000
4	01	19	01	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Implementasi Good Governance Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telepon, listrik, air dan internet	Kecamatan Haur Gading	100 %	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	100 %	20.200.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4 01 19 01 03	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (dapat di fungsikan)	Kecamatan Haur Gading	100 %	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0		100 %	7.500.000
4 01 19 01 07	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase ketepatan pertanggung jawaban sesuai dengan rencana anggaran kas	Kecamatan Haur Gading	100 %	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0		100 %	33.000.000
4 01 19 01 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase jasa kebersihan yang terealisasi	Kecamatan Haur Gading	100 %	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0		100 %	30.000.000
4 01 19 01 10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase ATK yang digunakan	Kecamatan Haur Gading	100 %	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0		100 %	15.000.000
4 01 19 01 11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan yang di	Kecamatan Haur Gading	100 %	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0		100 %	16.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021					
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
								APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)				
				butuhkan															
4	01	19	01	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase instalasi listrik dalam kondisi baik	Kecamatan Haur Gading	100 %	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0		100 %	5.000.000
4	01	19	01	13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Kecamatan Haur Gading	100 %	42.150.000	42.150.000	0	0	0	0		100 %	50.700.000
4	01	19	01	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase realisasi pelaksanaan rapat	Kecamatan Haur Gading	100 %	19.000.000	19.000.000	0	0	0	0		100 %	19.000.000
4	01	19	01	18	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase SPPD luar daerah yang dilaksanakan	Kecamatan Haur Gading	100 %	103.516.000	103.516.000	0	0	0	0		100 %	65.000.000
-	-	-	-	-	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Peningkatan Implementasi Good Governance</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel</b>	<b>Persentase Kualitas capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan</b>	<b>Kecamatan Haur Gading</b>	<b>100 %</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100 %</b>	<b>10.000.000</b>

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				<b>Daerah</b>											
	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase dokumen yang di selasaiikan tepat waktu	Kecamatan Haur Gading	100 %	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0		100 %	10.000.000
4 01 19 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Peningkatan Implementasi Good Governance</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik</b>	<b>Kecamatan Haur Gading</b>	<b>100%</b>	<b>112.250.000</b>	<b>112.250.000</b>	0	0	0	0		<b>100 %</b>	<b>118.650.000</b>
4 01 19 02 05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Kendaraan Dinas yang di beli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Kecamatan Haur Gading	3 Buah	63.000.000	63.000.000	0	0	0	0		2 Buah	43.000.000
4 01 19 02 -	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Rumah Dinas dalam kondisi baik	Kecamatan Haur Gading	100 %	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0		100 %	4.000.000
4 01 19 02 22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Gedung Kantor dalam kondisi baik	Kecamatan Haur Gading	100 %	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0		100 %	27.500.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4 01 19 02 24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Kendaraan Dinas yang di pelihara	Kecamatan Haur Gading	2 Buah	34.450.000	34.450.000	0	0	0	0		2 Buah	34.150.000
4 01 19 02 28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Jumlah Peralatan Kantor yang di pelihara	Kecamatan Haur Gading	8 Buah	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0		100 %	10.000.000
4 01 19 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Peningkatan Implementasi Good Governance</b>	<b>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel</b>	<b>Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai topoksi</b>	<b>Kecamatan Haur Gading</b>	<b>100 %</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100 %</b>	<b>15.000.000</b>
4 01 19 05 03	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan akuntabel	Persentase ASN yang dapat mengikuti diklat formal	Kecamatan Haur Gading	100 %	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0		100 %	15.000.000
4 01 19 07	<b>PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN</b>	<b>Peningkatan Implementasi Good Governance</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima</b>	<b>Persentase Desa yang tertib administrasi</b>	<b>Kecamatan Haur Gading</b>	<b>100 %</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100 %</b>	<b>20.000.000</b>
4 01 19 07 01	Kegiatan Pembinaan Administrasi PBB dan PAD	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Jumlah Desa yang di Bina administrasi PBB dan PAD	Kecamatan Haur Gading	18 Desa	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0		18 Desa	4.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4 01 19 07 02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Jumlah Desa yang di Bina	Kecamatan Haur Gading	18 Desa	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0		18 Desa	4.000.000
4 01 19 07 03	Kegiatan Monitoring Pembinaan Pembangunan Desa	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Jumlah Desa yang di monitoring pembinaan pembangunan	Kecamatan Haur Gading	18 Desa	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0		18 Desa	4.000.000
4 01 19 07 04	Kegiatan Monitoring Kegiatan Sosial dan Keagamaan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Jumlah Kegiatan social keagamaan yang di monitoring	Kecamatan Haur Gading	18 Desa	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0		18 Desa	4.000.000
4 01 19 07 05	Kegiatan Monitoring Perizinan Bangunan di Kecamatan	Peningkatan Implementasi Good Governance	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Jumlah Perizinan yang di monitoring	Kecamatan Haur Gading	18 Desa	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0		18 Desa	4.000.000
4 01 19 32	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU</b>	<b>Peningkatan Implementasi Good Governance</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Pelayanan Masyarakat</b>	<b>Kecamatan Haur Gading</b>	<b>100 %</b>	<b>74.609.000</b>	<b>74.609.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100 %</b>	<b>124.175.000</b>
4 01 19 32 01	Pengembangan Pelayanan Administrasi Kecamatan ( PATEN)	Peningkatan Implementasi Good	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang di	Kecamatan Haur Gading	800 Berkas	59.909.000	59.909.000	0	0	0	0		1 Kegiatan	37.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								APBD Murni	DAK		APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Governance		keluarkan											
4 01 19 32 02	Pelayanan Distribusi Beras Sejahtera (Rastra)	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Jumlah RTS PM yang menerima RASTRA	Kecamatan Haur Gading	1.139 RTS PM	14.700.000	14.700.000	0	0	0	0		1.139 RTS PM	87.175.000
4 01 19 21	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sosial Budaya</b>	<b>Meningkatnya Kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>Persentase Usulan Desa yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan</b>	Kecamatan Haur Gading	100 %	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0		100 %	30.000.000
4 01 19 21 01	Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	Meningkatnya Kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Terlaksananya Musrenbang di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Haur Gading	2 kegiatan	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0		2 Kegiatan	30.000.000
<b>BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>															
4 01 19 23	<b>PROGRAM PENDUKUNG KELANCARAN PEMILU</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sosial Budaya</b>	<b>Meningkatnya Kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>Persentase Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilih</b>	Kecamatan Haur Gading	100 %	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0			
4 01 19 23 01	Kegiatan Pemantauan dan dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pemilu Kada di daerah	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	Meningkatnya Kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam	Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pelaksanaan	Kecamatan Haur Gading	1 keg	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0			

Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
								APBD Murni	DAK		APBD Prov				APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
			pembangunan	Pilpres dan Pemilu Kada														
<b>URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG</b>																		
<b>BIDANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>																		
4	01	19	26	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	Meningkatnya Kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Suksesnya Kegiatan SKPD di Kecamatan Haur Gading	Kecamatan Haur Gading	100 %	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	100 %	25.000.000	
4	01	19	26	17	Kegiatan Pembinaan Masyarakat Sejahtera	Peningkatan Kualitas Sosial Budaya	Meningkatnya Kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Kegiatan SKPD yang di fasilitasi	Kecamatan Haur Gading	12 Keg	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	12 Keg	25.000.000
<b>JUMLAH KEBUTUHAN DANA TAHUN 2020</b>											<b>554.225.000</b>	<b>554.225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>604.225.000</b>	

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sedangkan untuk program kegiatan kepala SKPD Kecamatan Haur Gading berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Haur Gading Tahun 2017 – 2022.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Haur Gading dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Hulu Sungai Utara di Kecamatan Haur Gading.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Haur Gading. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Haur Gading ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi dilaksanakannya Rencana Kinerja Kecamatan Haur Gading Tahun 2020 ini, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

- 1) Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan ;
- 2) Pengkomunikasian / sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak

untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat ;

- 3) Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin, dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat ;
- 4) Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat ;
- 5) Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan Haur Gading sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin untuk nantinya menggunakan Rencana Kerja ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Kerja ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi

segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Haur Gading. Rencana Kerja ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan. Dengan demikian, setelah Rencana Kerja ini ditetapkan, Kecamatan Haur Gading telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan tahunan.

Amuntai, 29 Juli 2019

CAMAT HAUR GADING



**Drs. H. NAZRI**

NIP. 19610810 199203 1 007